

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Pemberdayaan Perempuan dalam Program Industri Rumahan di Kabupaten Kendal

Muliasih Listyorini Asyakra^a, Endah Mustika Ramdani^b, Rofi' Ramadhona Iyoea^c,
Cintantya Andhita Dara Kirana^d

^{a,b,c,d} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a20110135@poltek.stialanbandung.ac.id ,
^bbendah.mustika@poltek.stialanbandung.ac.id , ^crofi.iyoea@poltek.stialanbandung.ac.id ,
^ddara@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Kondisi pemberdayaan perempuan secara nasional menunjukkan adanya perbaikan selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan yang terus meningkat yang berarti menunjukkan adanya peningkatan pendapatan pada perempuan. Hal baik tersebut nyatanya belum dapat diikuti oleh beberapa daerah termasuk Kabupaten Kendal. Secara data, pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kendal justru mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah melalui program industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Penelitian ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi yang diberikan kedepannya. Dari penelitian yang telah dilakukan, pemberdayaan perempuan melalui industri rumahan di Kabupaten Kendal ini memiliki permasalahan dalam hal kontrol, juga partisipasi masyarakat yang masih kurang. Meskipun memiliki kendala dalam dua hal tersebut, pemberdayaan perempuan melalui industri rumahan ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan para perempuan khususnya bagi mereka ibu rumah tangga dan para perempuan kepala keluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka, disarankan untuk melakukan koordinasi lebih untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, selain itu pelaksanaan kontrol kegiatan yang harus ditingkatkan lagi, serta penggunaan buku panduan untuk mempercepat kelengkapan surat izin berusaha bagi setiap pelaku industri rumahan.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, industri rumahan

Women Empowerment Through Home Industry in Kendal Regency

Abstract

The condition of women's empowerment at the national level has shown improvement over the past five years. This is evident from the continuous increase in women's income contribution, which indicates a rise in women's earnings. However, this positive trend has not been mirrored in some regions, including Kendal Regency. Data shows that women's empowerment in Kendal Regency has actually decreased over the last three years. Efforts have been made through home industry programs to enhance family economic welfare. This study explains the outcomes achieved, the supporting and inhibiting factors, as well as future recommendations. From the research conducted, women's empowerment through home industries in Kendal Regency faces issues in terms of control and limited community participation. Despite these challenges, the empowerment of women through home industries has successfully improved the welfare of women, particularly housewives and female heads of households. Based on the research, it is recommended to improve coordination to increase community participation, enhance control over activities, and use guidebooks to expedite the completion of business licenses for each home industry actor.

Keywords: *Community empowerment, women's empowerment, home industry.*

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kendal mengalami penurunan mulai tahun 2021-2023. Dari tiga tahun tersebut, sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga mengalami penurunan hingga 0,81%. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Melihat dari tingkat pendidikan, diketahui bahwa rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh perempuan di sana hanya selama tujuh tahun. Berdasarkan pendidikan akhir yang ditempuh, diketahui bahwa per tahun 2023 terdapat sebanyak 81.507 perempuan di Kabupaten Kendal yang merupakan tamatan sekolah menengah pertama (SMP). Rendahnya tingkat pendidikan juga yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesempatan kerja, pendapatan, serta tingkat kesehatan yang diperoleh.

Rendahnya kesempatan kerja juga ikut berpengaruh terhadap rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga. Melihat mengenai kesempatan kerja, diketahui sebanyak 140.839 perempuan adalah mereka yang bekerja untuk mengurus rumah tangga tanpa memiliki penghasilan tambahan. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa jumlah lapangan kerja bagi perempuan di Kabupaten Kendal masih belum memenuhi. Kurangnya keterampilan bagi perempuan juga menyebabkan mereka lebih memilih mengurus rumah tangga. Hal itulah yang pada akhirnya juga membuat angka tenaga kerja wanita (TKW) semakin tinggi, dimana jumlahnya mencapai 3.063 perempuan. Jumlah tersebut pada akhirnya membuat angka tenaga kerja wanita di kabupaten Kendal menempati peringkat pertama se-provinsi Jawa Tengah.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan sebuah program bernama industri rumahan yang

telah berjalan sejak tahun 2016. Kabupaten Kendal sendiri menjadi salah satu dari 21 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengembangan model industri rumahan sejak awal program tersebut dilaksanakan. Mulai dari tahun 2016 hingga saat ini, terhitung jumlah total pelaku industri rumahan di Kabupaten Kendal adalah sebanyak 472 industri rumahan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pembahasan mengenai industri rumahan sudah sangat sering dilakukan namun setiap daerah memiliki industri unggulan yang berbeda yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pemberdayaan. Seperti dalam penelitian yang berjudul analisis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik home industry di kelurahan karanganyar gunung kecamatan candisari kota semarang, bahwa di daerah tersebut industri unggulannya adalah di bidang tas rajut, lumpia, dan olahan makanan. Sementara itu pada penelitian ini memiliki industri unggulan yang berbeda yakni dalam industri pemindangan dan pengasapan ikan. Perbedaan dalam hal industri unggulan ini tentu memberikan perbedaan juga terhadap karakteristik wilayah, ataupun permasalahan yang dihadapi.

Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, penggunaan konsep pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto ini masih sangat jarang. Mayoritas dari mereka yang menggunakan konsep ini membahas mengenai tahapan pemberdayaan yang telah dilalui. Seperti dalam penelitian yang berjudul membangun keberdayaan nelayan: pemberdayaan masyarakat nelayan melalui “kelompok usaha bersama berkah samudra” di Jepara. Dijelaskan bahwa dalam penelitian tersebut membahas mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat yang telah dilalui mulai dari penyadaran sampai peningkatan kapasitas. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya komitmen dari pengurus maupun anggota menjadi kunci

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

keberhasilan dalam tiga tahapan pemberdayaan yang dilaksanakan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan kali ini membahas mengenai hasil dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui empat indikator yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan kesejahteraan. Tentunya perbedaan tersebut akan memberikan pemahaman dan penjelasan yang berbeda.

Salah satu industri yang menjadi pilot proyek dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini adalah industri pemindangan dan pengasapan ikan. Industri ini bertempat di Desa Tanjungsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Industri tersebut dipilih sebagai pilot proyek dikarenakan potensi yang dimilikinya dalam bidang perikanan. Kondisi masyarakat desa juga turut menjadi alasan, bahwa dari segi pendidikan serta kesempatan kerja masih cukup rendah, juga karena tingginya angka tenaga kerja wanita (TKW) yang ada di desa tersebut. Industri pemindangan dan pengasapan ikan yang berdiri di Desa Tanjungsari dari awal pelaksanaan adalah sebanyak 31 industri. Seiring berjalannya waktu, kini hanya tersisa 25 pelaku industri yang masih aktif menjalankan usaha pemindangan dan pengasapan ikan. Penurunan jumlah pelaku industri rumahan tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan modal yang dimiliki juga karena harga jual produk pemindangan dan pengasapan ikan yang relatif kecil.

Berdasarkan laporan yang berhasil dihimpun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan program industri rumahan ini. Salah satu yang menjadi permasalahan di sini adalah terkait legalitas usaha mikro. Desa Tanjungsari dalam industri pemindangan dan pengasapan ikan juga mencatatkan bahwa sebanyak 70% atau 16 dari total 25 pelaku industri yang masih aktif belum memiliki surat izin usaha. Banyaknya pelaku industri rumahan yang belum memiliki surat izin usaha tentunya bertentangan

dengan salah satu prinsip yang ada di PerMen PPPA No. 2 Tahun 2016 mengenai pembangunan legalitas usaha. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan yang strategis, efektif, serta efisien untuk meningkatkan jumlah kepemilikan surat izin usaha bagi pelaku industri rumahan di Desa Tanjungsari.

Pemberdayaan sendiri merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menjadi lebih berguna dan berdaya. Lebih lanjut, bahwa pemberdayaan tidak hanya dapat memberikan manfaat dari aspek ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terkait kesetaraan gender yang di mana saat ini menjadi hal yang penting dalam sebuah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan salah satunya juga diperuntukkan untuk para perempuan supaya kemampuan yang mereka miliki dapat meningkat mampu memberikan kesetaraan dengan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari.

Guna melihat keberhasilan sebuah program pemberdayaan, dapat dilakukan dengan menganalisis ke empat indikator yang disampaikan oleh Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007). Menurut mereka, setidaknya ada empat indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sebuah program pemberdayaan yakni melalui akses, partisipasi, kontrol, dan kesejahteraan. Dengan menggunakan indikator tersebut, penelitian ini berusaha menjawab tentang hasil yang diperoleh, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki pelaksanaan dari program pemberdayaan di masa depan.

B. PEMBAHASAN

Hasil Pemberdayaan

Akses merupakan sebuah indikator dalam kegiatan pemberdayaan yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dapat mengakses sumber daya yang diberikan secara adil dan merata. Dari hasil penelitian, terkait akses informasi kegiatan pemberdayaan disebarkan langsung oleh

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pihak desa melalui sebaran undangan kepada pelaku industri rumahan yang telah tercatat. Adapun dalam undangan tersebut berisi perintah untuk berkumpul di balai desa untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai kegiatan yang akan diikuti. Adanya sebaran undangan fisik tersebut menunjukkan bahwa informasi kegiatan sudah mampu dijangkau oleh seluruh peserta pemberdayaan tanpa terkecuali, sehingga manfaat dari kegiatan pemberdayaan juga dapat dirasakan oleh seluruh peserta pemberdayaan.

Akses berikutnya yang diberikan oleh pemerintah berupa permodalan dalam bentuk sarana dan prasarana. Pada awal program dilaksanakan, sebanyak 35 pelaku industri rumahan masing-masing mendapatkan bantuan barang dalam bentuk lemari penyimpanan, baskom, dan cooler box untuk penyimpanan ikan. Sebaran bantuan tersebut telah mampu dijangkau seluruh peserta pemberdayaan pada awal pelaksanaan sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas usahanya.

Akses terakhir yang diberikan oleh pemerintah yakni mengenai akses pemasaran. Diketahui bahwa ternyata pemasaran yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk acara festival maupun bazar ini belum bisa dijangkau oleh seluruh pelaku industri rumahan termasuk industri pemindangan dan pengasapan ikan. Hal ini dikarenakan daya tahan produk yang relatif singkat, kemasan produk yang dinilai kurang menarik, hingga kelengkapan surat izin usaha yang belum memenuhi persyaratan. Dapat disimpulkan bahwa pemasaran yang diberikan oleh pemerintah belum mampu dirasakan manfaatnya khususnya bagi pelaku usaha pemindangan dan pengasapan ikan.

Indikator kedua yang dilihat disini adalah mengenai partisipasi. Mengenai partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan sudah selayaknya dilakukan antara dua pihak yakni pemerintah dengan masyarakat, oleh karena itu partisipasi dalam hal ini digunakan untuk melihat bahwa masyarakat memang diikutsertakan dalam setiap tahapan kegiatan

pemberdayaan. Tahapan pertama yang dilihat adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini keterlibatan masyarakat masih sangat kurang, sebagian besar proses perencanaan kegiatan dipegang oleh pemerintah selaku pihak yang memberikan pemberdayaan. Masyarakat hanya diberikan satu kali kesempatan pada saat kegiatan survei pada awal program berjalan. Survei tersebut dimaksudkan untuk mencari tahu permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena kurangnya keterlibatan masyarakat, membuat aspirasi masyarakat kurang dapat didengar oleh pihak pemerintah. Tahapan selanjutnya adalah saat pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini, keterlibatan masyarakat dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini didasarkan dari jumlah peserta yang hadir pada kegiatan pelatihan maupun sosialisasi. Dari setiap kegiatan, masing-masing target peserta pemberdayaan adalah dapat diikuti oleh 25-35 peserta. Pada saat realisasi, peserta tidak semuanya hadir dalam kegiatan. Kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga yang menjadi penyebab 1-5 orang memilih tidak hadir dalam kegiatan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan.

Indikator ketiga yang digunakan untuk melihat keberhasilan sebuah program pemberdayaan adalah kontrol. Kontrol disini dimaksudkan untuk melihat ketersesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Perihal kontrol pada program pemberdayaan industri rumahan ini ternyata terdapat satu tujuan yang masih belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut adalah mengenai pembangunan legalitas usaha mikro. Dari data yang berhasil dihimpun, sebanyak 16 dari 25 pelaku industri rumahan pemindangan dan pengasapan ikan di Desa Tanjungsari masih belum memiliki surat izin usaha baik itu berupa nomor induk berusaha (NIB) ataupun sertifikasi halal.

Melihat dari data mengenai kelengkapan izin usaha yang dimiliki oleh setiap pelaku industri rumahan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 16 pelaku industri yang belum sama sekali memiliki izin usaha. Sebanyak 7 pelaku

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

industri rumahan hanya memiliki satu jenis izin usaha yang dimana hal itu belum sesuai dengan ketentuan yang dimiliki oleh pihak dinas bahwa setidaknya-tidaknya pelaku industri pemindangan dan pengasapan ikan harus memiliki dua jenis surat izin usaha berupa nomor induk berusaha dan sertifikat halal.

Indikator terakhir yang digunakan untuk melihat keberhasilan dari sebuah program pemberdayaan adalah melihat melalui tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan yang dilihat dalam hal ini adalah dalam hal peningkatan pendapatan dan daya beli dari peserta pemberdayaan. Terkait pendapatan, mereka mengatakan bahwa pendapatan meningkat setelah mengikuti program pemberdayaan melalui industri rumahan ini. Adapun dalam sekali produksi mereka mampu mengoperasikan Rp. 500.000 – Rp. 3.000.000. Jumlah tersebut lebih tinggi 50% dibandingkan sebelum mereka mengikuti kegiatan pemberdayaan ini. Sementara itu, terkait daya beli yang dirasakan oleh peserta pemberdayaan, mereka tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, namun juga telah mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Hal tersebut tercermin dari adanya tambahan aset yang dimiliki seperti kendaraan bermotor, rumah atau lahan baru, serta sawah. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa terkait kesejahteraan sudah mampu memberikan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh peserta pemberdayaan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui industri rumahan ini setidaknya ada 2 hal. Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah ketersediaan bahan baku yang melimpah. Hal tersebut dikarenakan letak geografis desa yang dekat dengan garis pantai dan tempat pelelangan ikan. Hal ini tentu berpengaruh dalam pasokan ikan yang akan didapatkan serta harga ikan yang harus mereka bayar. Faktor kedua yang mempengaruhi adalah

adanya dukungan dari pemerintah. Dukungan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya kegiatan pelatihan, sosialisasi, serta bantuan dalam bentuk sarana prasarana. Dukungan tersebut lantas memberikan kekuatan bagi peserta pemberdayaan untuk terus berkembang baik dalam diri sendiri maupun mengenai kegiatan usaha yang dijalankan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui industri rumahan setidaknya ada 4 hal. Faktor pertama yang sangat mempengaruhi adalah terbatasnya pemasaran untuk produk pemindangan dan pengasapan ikan. Pemasaran yang dilakukan hanya sebatas melalui pasar tradisional ataupun berkeliling ke warung-warung makan. Tentu kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap omset yang akan dihasilkan. Faktor kedua adalah mengenai kelengkapan surat izin usaha yang pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan legalitas berusaha. Legalitas usaha dalam hal ini sangat penting, karena selain dapat memudahkan mereka ketika mencari tambahan modal, juga akan memudahkan mereka untuk mengikuti pemasaran yang diberikan oleh pemerintah. Faktor selanjutnya adalah terkait keterbatasan anggaran. Dimana mengenai keterbatasan anggaran ini akhirnya mempengaruhi jumlah kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Faktor terakhir adalah terkait kesibukan para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan mayoritas dari mereka adalah ibu rumah tangga yang memang masih memiliki tanggung jawab dalam urusan rumah. Keterbatasan waktu yang dimiliki pada akhirnya membuat para peserta memilih absen dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Rekomendasi Perbaikan

Rekomendasi Perbaikan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuat buku panduan. Buku panduan yang dimaksud adalah menjelaskan mengenai tahapan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Pembuatan buku panduan dalam hal sebagai bentuk upaya untuk mempercepat kelengkapan surat izin usaha, sehingga akan semakin memudahkan peserta pemberdayaan untuk melakukan pembuatan surat izin usaha secara mandiri serta mampu meningkatkan jumlah kepemilikan surat izin usaha bagi pelaku industri rumahan.



Gambar 1. Buku Panduan NIB
Sumber: Data pribadi penulis (2024)

Rekomendasi kedua yang dapat diberikan untuk memperbaiki pelaksanaan program industri rumahan ini adalah dengan melakukan perbaikan pada kemasan produk. Untuk memperbaiki kemasan produk pemindangan dan pengasapan ikan menjadi lebih menarik dapat dilakukan dengan mengganti kemasan produk menggunakan plastik yang kemudian di vakum untuk menghilangkan udara di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan produk, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pemasaran produk menjadi lebih luas.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui industri rumahan ini sudah sangat baik jika melihat pada keberhasilan indikator kesejahteraan. Adapun untuk ketiga indikator lain, yakni akses, partisipasi, dan kontrol masing-masing masih memiliki permasalahan yang tidak kalah penting seperti akses pemasaran yang belum bisa diakses oleh seluruh peserta industri rumahan, minimnya kegiatan diskusi untuk membahas rencana kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan, serta adanya ketidaksesuaian antara prinsip yang ditetapkan berupa pembangunan legalitas usaha mikro dengan kondisi yang ada di lapangan. Terkait faktor pendukung serta

penghambat, dapat terlihat bahwa penghambat dalam pelaksanaan program ini masih lebih dominan lebih banyak dibandingkan faktor pendukung yang ada. Banyaknya penghambat tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil pemberdayaan yang dilaksanakan.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperbaiki pelaksanaan program industri rumahan ini kedepannya dapat dilaksanakan melalui tiga hal berikut. Langkah pertama dengan melakukan percepatan pembuatan surat izin usaha yang dapat dilakukan melalui pembuatan buku panduan. Dari adanya buku panduan tersebut diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam pembuatan surat izin usaha secara mandiri. Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas jangkauan pemasaran yang dapat dilakukan melalui perbaikan kemasan. Memperbaiki kemasan dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengganti kemasan produk menggunakan plastik yang kemudian di vakum untuk menghilangkan udara di dalamnya. Tujuannya adalah agar produk pemindangan dan pengasapan ikan dapat memiliki daya tahan yang lebih lama, sehingga dapat dilakukan pemasaran melalui media sosial. Langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah peningkatan partisipasi peserta pemberdayaan melalui koordinasi dan pendampingan yang dilakukan antara pihak dinas bersama pendamping industri rumahan yang ada di Desa Tanjungsari sehingga diharapkan pemikiran mereka menjadi lebih terbuka dan tergerak untuk mengikuti setiap kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

REFERENSI

- Adriyani, R., Erna, E., Siswanto, A., & Indrianto, R. (2020). Pendampingan Kelompok Usaha Kerupuk Rajungan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Pesisir Pantai Utara Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 94.
- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Setiyono, B.,

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Novira, A., & Sutiyono, W. (2024). Self-organizing volunteers as a grassroots social innovation: the contribution and barrier to empowerment and collaborative governance in stunting intervention. *Development Studies Research, 11*(1).
<https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2357102>
- Agusti, A., Rakhman, F., Elfina, E., Mariatun, I. L., & Surur, M. (2023). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Studi Kasus Pada Usaha Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS, 13*(1), 347–361.
- Anomsari, E.A., Abubakar, R.R.T. (2019). Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Natapraja:Kajian Ilmu Administrasi Negara, 7* (1), 121 – 138.
<https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- Dwidjowijoto, N., & Wrihatnolo, R. (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. PT Elex Media Komputindo.
- Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 9*(2), 129–139.
- Kinanti, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus Kampung Tahu Tempe Gumregah di Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang). *Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, 8*(02), 21–30.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat (E. R. Fadilah (ed.); 1st ed.). Deepublish Publisher.
- Mursalim, W., Ravenska, N., & Wijayanti, R. (2020). Penguatan pengusaha pemula berbasis teknologi jawa barat melalui pendampingan inkubator bisnis politeknik STIA LAN Bandung. *SeTIA Mengabdikan : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(1), 1–9.
- Panjaitan, A. E., Widjayanti, A., & Sutrisno, E. (2022). The Implementation of Jakarta Entrepreneurship (Jakpreneur) Program in Empowering Small and Medium Enterprises in Kembangan District Administrative City of West Jakarta. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship, 4*(1), 28–36.
 Retrieved from <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jbest/article/view/444>
- Pradesa, H. A., Zulvia, P., & Syawali, A. Z. S. (2022). Policy Advocacy for Strengthening Village Governance in Developing Tourism Destination in Wangunharja Village. *Empowerment Society, 5*(1), 33–40.
<https://doi.org/10.30741/eps.v5i1.840>
- Ramdani, E.M., Maasir, L., Artisa, R.A. (2020). Strategi Community Engagement Dalam Program Gema Madani Simpati (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif) di Kota Tasikmalaya. *Moderat : Jurnal Ilmu Pemerintahan. 6* (4), 728-743
- Ramdani, E.M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 22* (2), 163-182.
<http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>.
- Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (A. Gunarsa (ed.); 3rd ed.). PT. Refika Aditama.
- Wijayanti, R., Adfani, M.D., Valentina, C., Siregar, I.N.L., Rahayu, K. (2023). Peningkatan Kapasitas Usaha Produk Olahan Bonggol Pisang melalui Pendampingan Inkubator Bisnis. *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4* (2), 46 – 55.